



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 November 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2025
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR
Hadir	: A. 20 (dua puluh) dari 43 (empat puluh tiga) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Wakil Menteri Dalam Negeri/BNPP C. Menteri PANRB D. Kepala BKN E. Kepala OIKN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri/BNPP, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Kepala OIKN, dengan agenda evaluasi dan proyeksi program kerja Kementerian/Lembaga tahun 2025, hari Selasa, 25 November 2025, dibuka pukul 13.18 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)

A. Inti Anggaran & Realisasi

- Pagu awal Rp267,1 M → dipotong efisiensi → turun menjadi Rp138,4 M.
- Setelah relaksasi tahap I & II, pagu meningkat menjadi **Rp214,8 M**.
- Realisasi per 21 Nov 2025: **83,02%**, di atas rata-rata nasional.
- Proyeksi akhir tahun: **99,59%** (hampir habis terserap).

B. Kinerja Utama

- Penghargaan WTP 11 kali berturut-turut.
- Indeks Reformasi Hukum: **99,50 (kategori AA)**.
- Kegiatan prioritas: pemberdayaan masyarakat perbatasan, survei jalur tidak resmi, penyusunan rencana induk & renstra.

2. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)

A. Anggaran & Realisasi

- Pagu efektif setelah efisiensi & relaksasi: **Rp3,84 T**.
- Realisasi per 24 Nov 2025: **69,56%**.
- Proyeksi akhir tahun: **99,17%**.
- PNBP melampaui target → realisasi **184,55%**.

B. Program Strategis Presiden yang Didukung

- **Makan Bergizi Gratis**: verifikasi 8.286 lokasi SPPG.
- **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**: 82.360 koperasi terbentuk (98,3%).
- **Cek Kesehatan Gratis**: 56,3 juta warga sudah terlayani.
- **Program Tiga Juta Rumah**: percepatan perizinan PBG & 101 ribu unit didukung APBD.
- **Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat**: pembinaan di >160 lokasi.
- **Penanganan TBC**: 20 provinsi & 153 kabupaten/kota telah tetapkan rencana aksi.
- **Swasembada pangan**: monitoring irigasi 848 ribu ha.
- **Penanganan sampah**: penerbitan pedoman teknis & dukungan regulasi.

3. OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara)

A. Target Pembangunan 2025 (Perpres 79/2025)

- KIPP terbangun **800–850 ha**.
- Progres pembangunan gedung **20%**, hunian **50%**.

- Prasarana dasar **50%**, indeks konektivitas **0,74**.
- ASN pindah ke IKN **1.700–4.100 orang**.

B. Anggaran & Realisasi

- Pagu belanja (setelah efisiensi): **Rp8,92 T**.
- Realisasi per 21 Nov: **55,9%**.
- Proyeksi akhir tahun: **96,9%** (dominan dari kontrak IKN Batch 2 Rp3,68 T).

C. Pembangunan Jangka 2025–2028

- Total kebutuhan Rp48,8 T (Batch 1–3).
- Paket konstruksi besar untuk jalan, MUT, embung, retensi, pipa air, hunian negara, kantor legislatif & yudikatif.

D. Investasi

- 17 calon pemrakarsa KPBU (estimasi Rp158,7 T).
- 50 investor swasta sudah menandatangani kerja sama (nilai Rp66 T).

4. KemenPANRB (Kementerian PANRB)

A. Fokus Program 2025

- Penataan Kabinet Merah Putih (pengisian jabatan, tunjangan kinerja 29 K/L).
- Grand Design RB 2025–2045 (selaras RPJP).
- Transformasi pengawasan lewat sistem *conflict of interest* digital.
- Percepatan transformasi digital pemerintah.

B. Capaian Kunci

- Penyusunan *8 proses bisnis tematik* untuk prioritas Presiden (kemiskinan, kesehatan, perlintas).
- Integrasi layanan ASN menuju platform **Smart ASN** (kerja bareng BKN & LAN).
- Flexible Working Arrangements ditetapkan (PermenPANRB 4/2025).
- Evaluasi MPP berbasis *omnichannel*; perluasan fungsi MPP sebagai pusat informasi & layanan publik.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri/BNPP, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Kepala OIKN, dengan agenda evaluasi dan proyeksi program kerja Kementerian/Lembaga tahun 2025, memiliki kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengar dan memahami pemaparan yang disampaikan oleh mitra kerja yaitu: Kementerian Dalam Negeri/Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (Kemendagri/BNPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Terkait capaian kinerja seluruh mitra kerja tahun 2025, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp2.676.533.106.778,-** (*dua trilyun enam ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp3.847.920.551.000,-** (*tiga trilyun delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*) atau sebesar 69.56%.
 - b. Kementerian PANRB sebesar **Rp230.394.019.297,-** (*dua ratus tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp314.801.562.000,-** (*tiga ratus empat belas milyar delapan ratus satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*) atau sebesar 73.19%.
 - c. BKN sebesar **Rp763.042.317.128,-** (*tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah*) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp862.743.974.000,-** (*delapan ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) atau sebesar 88.44%.
 - d. BNPP sebesar **Rp178.364.403.005,-** (*seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima rupiah*) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp214.841.161.000,-** (*dua ratus empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*) atau sebesar 69.35%.
 - e. OIKN sebesar **Rp4.992.352.026.000,-** (*empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua puluh enam ribu rupiah*) dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp8.929.461.304.000,-** (*delapan trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah*) atau sebesar 55.90%.
2. Terhadap capaian kinerja mitra kerja Komisi II DPR RI, Komisi II DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:
- a. Meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan OIKN dalam rangka memastikan ketersediaan sumberdaya ASN, pemindahan

dan penempatan ASN guna menyiapkan secara bertahap sistem pemerintahan di IKN.

- b. Meminta Kementerian PANRB memastikan percepatan transformasi digital pemerintah di pusat dan daerah, terutama dalam penyederhanaan layanan publik dan perbaikan kinerja ASN, melalui kolaborasi ekosistem digital pemerintah yang berjalan di kementerian/lembaga/pemda sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi hasil.
- c. Meminta BKN melakukan percepatan penataan manajemen ASN, termasuk penerapan digitalisasi layanan kepegawaian, penguatan sistem manajemen talenta, pengembangan asesmen kompetensi digital ASN, serta kesiapan sistem untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN, sehingga mobilisasi SDM pemerintah berlangsung tertib, akurat, dan sesuai sistem merit.
- d. Meminta Kemendagri segera menyelesaikan proses administratif batas wilayah 7 (tujuh) kecamatan dan 54 desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi cakupan wilayah IKN, serta sengketa tapal batas provinsi/kabupaten/kota di wilayah Indonesia.
- e. Meminta Kemendagri memperkuat pelaksanaan kegiatan strategis di daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), peningkatan tata kelola pengawasan, hingga stabilitas politik, agar pengawalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah menghasilkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
- f. Meminta Kemendagri mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan belanja pada penghujung Triwulan IV TA 2025, agar daerah yang serapan belanjanya masih rendah untuk segera direalisasikan dan tidak mengganggu layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
- g. Meminta BNPP mempercepat penataan dan penguatan kawasan perbatasan, penyelesaian sengketa batas negara, serta memastikan kehadiran negara melalui pelayanan dasar, infrastruktur konektivitas, dan penguatan pos lintas batas agar perbatasan tidak hanya menjadi garis batas, tetapi berfungsi sebagai beranda depan yang aman dan produktif bagi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Meminta Otorita IKN memastikan keberlanjutan dan akselerasi penyelesaian pembangunan IKN dengan memprioritaskan penyediaan infrastruktur pemerintahan yang memadai, percepatan pemindahan ASN, penyelesaian kantor lembaga legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukungnya, serta percepatan

pembentukan dan operasionalisasi Pemerintah Daerah Khusus IKN agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

3. Komisi II DPR RI meminta komitmen dari seluruh mitra kerja untuk melaksanakan program kerja kementerian/lembaga yang selaras dengan Program Prioritas Presiden tahun 2025 dan mengoptimalkan capaian kinerja maksimal sesuai target Kementerian/Lembaga masing-masing hingga akhir tahun 2025 serta memastikan program kerja yang telah dilaksanakan berdampak langsung terhadap masyarakat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.13 WIB.

JAKARTA, 25 NOVEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.
A-416